

MATINYA PESANTREN DI KOTA PEKALONGAN

Aris Nurkhamidi¹

Abstract: The existence and contribution of Islamic boarding school (*pesantren*) for Indonesian people is significance enough. *Pesantren* is an educational and community development institution. Its existence in Pekalongan, however, is in serious condition. Today, its development is less maximal, the increase of student amount is not significance, the Islamic classical book study does not improve, and the institution is stagnant, i.e. as a religious learning place only. There are some *pesantrens* that their student amount become more in a little calculation every years, and even their students are off, and only few *pesantrens* develop bigger. This research describes that condition and government take a strategic initiative to reinforce their existence and vitality

Kata Kunci: Pesantren, masyarakat, pembaharuan

PENDAHULUAN

Eksistensi pondok pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan di Indonesia sudah diakui banyak kalangan. Pemerintah mengakui bahwa pondok pesantren menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan di tanah air. Data yang dimiliki pemerintah menunjukkan bahwa daya tampung lembaga pendidikan milik pemerintah tidak mencukupi bagi semua angkatan belajar baru, terutama pendidikan dasar dan menengah. Bukan hanya itu, anggaran pemerintah untuk pendidikan belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan pendidikan ke arah ideal, walaupun saat ini pemerintah tengah mengupayakan proporsi yang lebih besar dari tahun sebelumnya (UU No 20: 2003). Karena itu, dalam konteks perluasan kesempatan belajar, pesantren telah memainkan peran amat besar. Pemerintah mengapresiasi peran pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia melalui pendidikan sangat besar.

Bukan hanya pada domain pendidikan, pesantren juga memberikan kontribusi yang besar bagi pemberdayaan masyarakat dan penguatan moral sosial. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, banyak pesantren di Indonesia tidak hanya membuka kegiatan pendidikan, tetapi juga membuka layanan masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi dalam bentuk koperasi, baitul maal dan wirausaha. Ada juga pesantren yang membuka konseling psikologi, rehabilitas sosial pecandu narkoba, pesantren waria dan program kreatif lainnya. Pemerintah sangat mengapresiasi peran-peran penting pesantren ini.

Apresiasi pemerintah terhadap pesantren dapat juga dilihat dalam konteks sosio-politik. Dalam banyak kepentingannya, di antaranya kepentingan pembangunan sosial, politik, kesehatan dan akhir-akhir ini juga domain ekonomi, pemerintah menjalin kerjasama dengan pondok pesantren.

Selain pemerintah, masyarakat juga mengakui eksistensi pesantren amat penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Argumentasinya bukan hanya alasan ketidakmampuan anggaran pemerintah, tetapi lebih ke hal yang sistemik-substansial. Masyarakat Indonesia yang beragam memiliki standar kebutuhan pendidikan yang berbeda (*different need*), yang tidak semuanya dapat dipenuhi oleh sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Berdasarkan

¹ Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan

alasan ini, masyarakat melihat bahwa pesantren memiliki karakteristik, sistem, orientasi, materi dan standar kompetensi yang berbeda dari sistem pendidikan yang ditawarkan pemerintah.

Secara sosiologis, perkembangan zaman ke arah globalisasi yang sarat dengan industrialisasi, kompetisi, individualitas dan meninggalkan tradisi patron kolegal, *gemeinschaaf*, moral sosial dan naturalitas semakin disadari sebagai masalah sosial yang urgen dan mendesak. Krisis kemanusiaan dan modernitas terus menjadi tema dalam kajian keilmuan dan pengembangan kebijakan pembangunan. Secara sosiologis, pendidikan berwatak moral yang kuat menjadi kerinduan dan kebutuhan masyarakat modern di tengah gempuran modernisasi tersebut.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, pemerintah merasakan ada tantangan yang cukup besar dalam pembangunan moral. Bukan moral dalam arti yang sederhana saja, tetapi moral dalam konteks yang lebih besar, seperti moral profesi, moral politik, moral ekonomi dan sebagainya. Persoalan budaya akhir-akhir ini juga menjadi masalah yang cukup serius, mulai memudarnya etika dan budaya timur, pergaulan anak-anak terpelajar yang kian permissif, kriminalitas di kalangan pelajar dan sebagainya. Pemerintah berharap besar pada dunia pesantren untuk terus memaksimalkan perannya dalam pembangunan pendidikan dan sosial di Indonesia.

Namun kebenaran pesantren secara teoretis ini secara faktual tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kondisi pesantren di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan secara jamak oleh masyarakat dikenal sebagai salah satu pusat komunitas muslim cukup besar yang memiliki tradisi, sistem pendidikan Islam, kultur dan pesantren yang kuat. Namun berdasar kajian pendahuluan (*preliminary studies*) banyak pondok pesantren di Kota Pekalongan yang tidak berkembang, statis, bahkan mati. Banyak pondok pesantren yang jumlah santrinya tinggal 20% dibanding 6 tahun lalu. Program-program pendidikan di beberapa pondok pesantren sulit dikembangkan karena terbatasnya santri. Beberapa pesantren juga menurunkan bobot materi pendidikannya, di antaranya berkurangnya kitab-kitab besar yang dipelajari, berganti dengan kitab-kitab lebih "kecil" karena menyesuaikan santrinya.

Fakta ini tentu berbeda dengan teori yang berkembang tersebut. Karena itu, kiranya relevan (*hipotetically*) dilakukan pengkajian dengan mengajukan beberapa pertanyaan: mengapa nasib pesantren di Kota Pekalongan seperti itu? Apakah terlindas oleh arus modernitas sehingga ditinggalkan oleh masyarakat, atau pesantren tidak mampu menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Adakah kebijakan pemerintah yang timpang terhadap pesantren di banding pendidikan formal? Kemudian, apa yang harus dilakukan pesantren ditengah kondisi seperti ini? Bagimanakah seyogyanya pemerintah turut serta memikirkan hal seperti ini?

Zamakhsyari Dhofier (1982: 45) menjelaskan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki karakteristik dan fungsi yang menarik. Pesantren memiliki "body" yang lebih lengkap dibanding sistem pendidikan formal. Jika lembaga pendidikan hanya memiliki ruang kelas sebagai media belajar, pesantren memiliki pondok (*boarding house*) dan masjid yang menjadi media belajar yang terbuka, interaktif dan fungsional setiap saat. Sistem pendidikan dengan model seperti ini dinilai lebih intensif baik dalam pengelolaan subyek belajar, pengembangan tradisi keilmuan maupun internalisasi nilai. Inilah yang pada saat ini, banyak lembaga pendidikan modern mencoba menduplikasi sistem pesantren tersebut yang populer disebut *boarding school system*. Peran kyai juga lebih dari sekadar guru seperti halnya di

lembaga pendidikan lainnya. Kyai memiliki kemampuan ilmiah yang diakui dan sekaligus integritas moral ilmiah menyatu dalam moral sosial.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, (Depag: 2003) menegaskan bahwa secara sistemik kelembagaan pesantren memiliki peran bukan hanya di bidang pendidikan agama saja, tetapi juga pengembangan intelektualitas dalam arti seluas-luasnya, pembangunan sosial ekonomi dan juga IPTEK. Kesadaran fungsi ini akhirnya menjadikan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pelengkap (*subordinatif*) dalam sistem pendidikan nasional, tetapi menjadi substansi pada ranah yang memang bersifat khusus. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional telah menyepakati "kavling" pendidikan pesantren pada jalur yang lebih besar. Pesantren memiliki otoritas pengembangan pendidikan melalui jalur formal, non formal dan informal.

Namun, seiring dengan perkembangan tantangan modernitas pesantren perlu terus meng-*upgrade* dirinya dengan menata manajemen yang lebih modern, baik dalam konteks kelembagaan maupun pendidikan.

Dawam Raharjo (1988: 10) mengemukakan bahwa eksistensi pesantren yang sudah cukup terbukti membawakan perubahan sosial bagi masyarakat Indonesia harus terus dijaga. Tetapi bukan denganewartakan peran historis pesantren atau mengkeramatkan institusi pesantren. Pesantren harus menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan komunitas yang dilayani. Kultur pesantren tidak boleh lapuk atau pudar, tetapi harus mampu menemukan kultur baru yang sinergi dengan ruh lamanya.

Kementerian Agama (Tim Depag: 2003) melihat bahwa banyak tradisi keilmuan pesantren yang terus aktual. Misalnya tradisi *hiwar* (musyawarah) dan tradisi *mudzakarah* (*bahts al-masail*), memiliki signifikansi dengan tradisi keilmuan yang berkembang di Eropa yang dikenal kritis konstruktif. Dua metode di pesantren tersebut memiliki ruh, model dan tujuan yang sama. Karena itu, tetaplah signifikan mengembangkan eksistensi pesantren di tengah arus modernitas ini. Berpulang pada manajemen yang digunakan, progressif atau historis-regressif.

Faisal Ismail (2003: 6) membuat hipotesis bahwa pesantren tidak akan maju kalau tidak memiliki tantangan. Karena itu, di tengah arus modernitas ini, pesantren mestinya melihat kemodernan bukan sebagai masalah tetapi menjadi tantangan yang harus dikelola. Banyak pesantren yang tetap eksis karena mampu mengelola tantangan yang dihadapi masyarakat menjadi ranah yang dikerjakan oleh pesantren. Salah satu inspirasi yang harus terus menerus dinyalakan pesantren adalah semangat untuk belajar setiap waktu, seperti halnya hal itu telah menginspirasi lahirnya pesantren dan tokoh-tokoh pendidikan masa lalu (abbasyiyah).

Sulthon Masyhudi dan Khusnur Ridlo (2005: 31, 64, 79) berkesimpulan bahwa untuk menghadapi tantangan perubahan kultur di masyarakat, pesantren harus melakukan penataan manajemen. Diantaranya perlu melakukan inovasi sistemik, pengembangan kurikulum dan mendekatkan pesantren dengan isu-isu strategis dan aktual. Ketajaman melihat dan melibatkan diri membahas isu-isu aktual akan menjadi daya tawar pesantren di tengah konstelasi pendidikan, sosial dan politik saat ini. Misalnya saja isu peningkatan mutu sosial dan penyelesaian krisis multi dimensi yang tengah menjadi isu internasional saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan masalah mengenai gejala melemahnya eksistensi pesantren dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut (*explanation research*). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yakni penelitian yang mengkaji tentang realitas atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini akan mendiskripsikan fakta (*descriptive analysis*) dan menganalisis masalah-masalah yang menjadi sebab dan akibat dari fakta tersebut. Analisis selain mendasarkan data kuantitatif, juga menggunakan analisis kualitatif sebagai alat membedah masalah. Data yang diperlukan dalam riset ini dikelompokkan dalam data primer dan sekunder. Data primer berhubungan dengan domain utama obyek, sedang data sekunder adalah data pendukung. Data primer antara lain data kondisi pendidikan pesantren, monografi pesantren dan kurikulum pesantren. Data sekunder antara lain kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan tentang produk kebijakan dan yuridis yang berhubungan dengan eksistensi pondok pesantren. Data diperoleh dengan wawancara dan observasi. Langkah analisis data menggunakan teknik Huberman (1984 ; 20) *reduction, data display* dan *conclusion*. Untuk memperhatikan setiap data yang masuk namun tetap memperhatikan validitas, relevansi dan kegunaannya, analisis data juga menggunakan teknik analisis triangulasi data dan sumber. (Sugiono:2005)

PEMBAHASAN

Kondisi Umum Pondok Pesantren

Secara umum pondok pesantren di Kota Pekalongan relatif kurang berkembang. Ini dilihat dari 3 (tiga) parameter, yakni pertumbuhan jumlah santri, pertumbuhan lembaga pendidikan dan kajiannya di lingkungan pesantren dan sistem pengelolaan pesantren.

Dari 44 pesantren di Kota Pekalongan yang terregister di kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, hanya ada beberapa pesantren saja yang jumlah santrinya bertambah dari waktu ke waktu secara signifikan. Pesantren-pesantren tersebut antara lain: PP. Ribatul Mutaallimin, PP. Al-Arifyyah, PP. Syafii Akrom, PP. Tahfidz Al-quran Buaran, dan PP. Tahfidz al-Irsyad.

Namun, angka valid berapa persen pertambahannya dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir tidak dapat dikemukakan secara pasti, karena pengelola pesantren tidak dapat menunjukkan angka persisnya. Namun, berdasarkan kondisi yang ada, para pengelola pesantren tersebut pada umumnya bisa memastikan bahwa terdapat kenaikan jumlah santri dalam 3 tahun terakhir. Pengelola pesantren sendiri tidak dapat menyebut data-data primer mengenai santri di pesantrennya secara tepat, seperti data tentang asal santri, berapa lama rata-rata belajar di pesantren, dan apa yang dilakukan santri setelah keluar dari pesantren.

Pertambahan jumlah santri di pesantren lain umumnya sangat kecil. Ada yang hanya 5 orang pertahun, ada yang 10 – 15. Pertambahan angka itu umum pada pesantren yang santrinya sedikit, yakni antara 10 – 50 santri.

Kantor Kemenag Kota Pekalongan pun tidak bias memberikan informasi jelas dan akurat mengenai kondisi pesantren di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Argumen yang dikemukakan pihak kantor kemenag, bahwa pada saat kantor kemenag Kota Pekalongan meminta data, umumnya data yang disampaikan pesantren kurang lengkap, dan lebih sering kurang valid. Ini dapat diindikasikan bahwa pada umumnya pesantren merasa kurang berkepentingan dengan data tersebut terhadap pihak eksternal, termasuk kantor kemenag. Bisa juga sebetulnya pesantren berkepentingan terhadap kemenag, namun karena manajemen organisasinya kurang baik, tidak dapat menunjukkan data yang valid mengenai pesantrennya.

Mengenai bertambahnya jumlah santri pada pesantren-pesantren tersebut juga tidak dapat ditemukan sebab atau faktor-faktor pendorongnya secara pasti. Ini karena pesantren selama sekian lamanya juga tidak pernah melakukan evaluasi diri mengenai pertumbuhan santrinya. Berapa persen pertambahan rata-rata pertahun, bagaimana target dan capaiannya, faktor apa saja

yang harus dipertimbangkan dan usaha atau strategi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan santri baru. Kantor kemenag Kota Pekalongan juga tidak pernah melakukan evaluasi hal tersebut, atau menyampaikan hal tersebut kepada pesantren.

Dalam konteks usaha meningkatkan jumlah santri, umumnya pesantren tidak punya usaha sistematis untuk mendapatkan santri. Usaha-usaha yang biasa dilakukan lembaga pendidikan formal seperti memasang spanduk, kunjungan ke sekolah, menyebar leaflet, memasang iklan di media cetak dan elektronik tidak pernah dilakukan pengelola pesantren. Usaha yang sifatnya referensial secara serius juga tidak pernah dilakukan pesantren, misalnya dengan menitipkan pesan agar santri yang ada di pesantren tersebut mengajak teman, *family* atau kerabat untuk “nyantri” di pesantren tersebut.

Kondisi ini sangat berbeda dengan pola referensial di lembaga pendidikan formal. Salah satu bentuk usaha mendapatkan siswa baru di lembaga formal diantaranya, memberikan *reward* kepada setiap orang yang mampu menarik mahasiswa atau siswa baru. Model ini sama sekali tidak dikenal di lingkungan pesantren. Dengan demikian bertambahnya jumlah santri ini tidak dapat disebut sebagai usaha pesantren sepenuhnya dalam mencari tambahan santri baru. Bertambahnya santri lebih tepat disebut sebagai keadaan yang terjadi secara alami, efek dari relasi sosial santrinya terhadap komunitasnya yang tidak secara sadar dikonstruksi untuk mempengaruhi minat belajar ke pesantren. Karena itu bertambahnya jumlah santri ini dapat juga disebut sebagai efek dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren tersebut, yang terjadi secara alami (*natural effect*), belum *strategic* dan *technical effect* yang baik. *Closing statemen* fakta ini adalah pesantren minim *marketing strategy*.

Indikator lain mengenai kurang berkembangnya pesantren di Kota Pekalongan adalah pertumbuhan kelembagaan di lingkungan pesantren. Hampir semua pesantren tidak dapat mengembangkan institusi-institusi sayap sebagai pengembangan pesantren. Pesantren yang memiliki institusi sayap paling besar adalah pesantren Ribatul Mutaallimin, yang memiliki lembaga pendidikan madrasah diniyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Sementara umumnya pesantren hanya dapat mengembangkan pesantrennya dengan mendirikan madrasah diniyah dan majelis ta’lim. Pesantren juga tidak ada yang memiliki lembaga kreatif yang bergerak di bidang keagamaan seperti lembaga amal zakat, lembaga baitul maal, lembaga pengelola qurban dan lain sebagainya. Di luar bidang keagamaan, seperti koperasi, wirausaha, pendidikan keterampilan dan sebagainya ternyata juga tidak tumbuh.

Faktor Pengaruh

Bagian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi pesantren di Kota Pekalongan kurang berkembang.

Kebijakan Pembangunan Daerah

Kondisi sosiologis masyarakat Kota Pekalongan adalah masyarakat dengan dua karakter yang cukup dominan, yakni industri dan keagamaan. Kondisi sosiologis ini menjadi parameter penting bagi masyarakat untuk menilai, apakah Kota Pekalongan dari hari ke hari berkembang di atas jati diri kota tersebut atau bukan. Masyarakat berkeinginan agar Kota Pekalongan tumbuh sebagai kota yang secara ekonomi maju, dan memiliki kultur keagamaan dan moral yang kuat.

Dalam konteks kebijakan pembangunan, sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, setiap kepala daerah harus memiliki visi yang jelas dalam memimpin daerahnya. Bahkan visi seorang kepala daerah harus sudah disiapkan sebelum

mencalonkan diri menjadi kepala daerah, diserahkan sebagai dokumen persyaratan pencalonan. Visi yang ditulis pada saat itu harus serius, karena akan menjadi dokumen negara, yang harus dipertanggungjawabkan dengan nyata pada saat nanti menjadi kepala daerah. Visi bukanlah janji yang muluk-muluk yang sulit dicapai dan tidak berbasis kebutuhan daerah (Visi: 2010).

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk misi. Selanjutnya misi dijabarkan dalam bentuk program aksi, yang disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

RPJMD ini kemudian dilaksanakan selama lima tahun --masa periode kepemimpinan kepala daerah-- dengan pentahapan yang disusun setiap tahun. Pelaksana teknis RPJMD ini adalah unit-unit yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan, dan ada pula yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Untuk mengetahui bagaimana implementasi visi pembangunan masyarakat yang *religious* dapat ditelusuri melalui beberapa pintu. *Pertama*, melihat program yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Badan inilah yang bertugas merencanakan dan mengkordinasikan pembangunan yang ada di wilayah Kota Pekalongan. *Kedua* menelusuri program dan aksi yang dilakukan oleh unit termasuk satuan kerja di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan hasil penelusuran data mengenai program pembangunan dan wawancara dengan sumber di otoritas pemerintahan Kota Pekalongan ditemukan hal-hal yang cukup menarik. *Pertama*, visi pembangunan Kota Pekalongan yang *religious* tidak tampak dalam program yang secara khusus ditujukan untuk pemberdayaan atau pengembangan pesantren. Dokumen di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak memasukkan rencana pembangunan “religiusitas” Kota Pekalongan melalui pemberdayaan pesantren (BAPPEDA: 2010). Visi pembangunan keagamaan lebih nampak diwujudkan melalui program dukungan dana bagi guru-guru yang mengajar di TPQ, bantuan untuk madrasah, dan kebijakan membuat sekolah-sekolah negeri di kota Pekalongan sebagai sekolah berbasis PAI (pendidikan agama Islam). Maksud berbasis PAI di sini adalah pada sekolah tersebut ada program penguatan ke-Islam-an dalam bentuk materi baca tulis al-Quran. Materi ini sifatnya bukan menggantikan materi belajar lain, tetapi menambah. Umumnya penataan jam BTQ juga tidak mengganggu jadwal materi sekolah, karena itu biasanya BTQ dilakukan pada pagi hari, sebelum jam belajar materi sekolah dimulai. Saat ini diantara wujudnya adalah pelaksanaan kegiatan baca tulis al-Quran di sekolah-sekolah umum. Untuk mendukung program ini, sekolah dibantu dengan guru-guru BTQ, yang anggaran untuk honorarium guru TPQ dibantu oleh pemerintah, meskipun amat kecil, yakni 150 ribu rupiah per guru perbulan, yang dibayarkan tiga bulan sekali.

Kebijakan pemerintah Kota Pekalongan yang berhubungan dengan pesantren hanya dalam bentuk pelayanan bantuan bagi pesantren. Pemberian bantuan inipun dilakukan secara responsif, artinya menjawab proposal permintaan bantuan dana dari pesantren, bukan desain yang baku pengembangan pesantren dengan standar dan kriteria yang baku juga. Pesantren yang mendapat bantuan dana adalah pesantren yang mengajukan proposal, sedang yang tidak mengajukan tidak mendapat bantuan. Bahkan, menurut data yang ada tidak semua proposal permintaan bantuan dana dari pesantren dapat dikabulkan.

Berdasarkan analisis di atas, paling kurang dapat dirumuskan dua hal penting mengenai relasi antara pemerintah dengan pesantren bahwa secara akademik, pesantren memiliki peran yang cukup besar dalam memberdayakan masyarakat. Selain memberikan pendidikan untuk santri yang belajar di dalamnya, secara sosiologis pesantren membangun kultur dan pengaruh

budaya yang baik bagi masyarakat sekitar. Masalahnya adalah, saat ini keberadaan pesantren sudah mendapat pengakuan eksistensial pemerintah namun belum disertai dengan dukungan kebijakan dan juga anggaran yang memadai. Pengakuan eksistensial dan apresiasi saja tentulah belum cukup, namun faktanya demikian. Dalam beberapa kesempatan pesantren dijadikan sebagai salah satu ikon penting masyarakat Kota Pekalongan dan visi pembangunan yang menarik bagi masyarakat, namun lebih dari pengakuan dan pujian belum ada langkah strategis pemerintah untuk memberdayakan pesantren selain hanya dalam bentuk dukungan dana dan beras kepada sebagian pesantren.

Relasi Kantor Kemenag Kota Pekalongan dengan Pesantren

Program Kerja

Sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya, kementerian agama memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan pesantren. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, pada Kantor Kementerian Agama terdapat bagian atau unit yang menangani masalah pesantren, yakni Seksi Pekapontren. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal-hal yang cukup ironis. Menurut responden, pesantren sangat jarang mendapat bimbingan Kantor Kemenag Kota Pekalongan. Responden juga menilai kemenag kurang memahami masalah-masalah pesantren di Kota Pekalongan.

Masalah data

Sebagai intitusi birokrasi pemerintahan yang mengurus pesantren, data tentulah memiliki peran penting. Dalam teori administrasi, data bukanlah sekadar arsip yang bersifat pasif. Data memiliki arti sebagai sumber informasi mengenai kondisi sesuatu dari waktu ke waktu hingga kapanpun. Melalui analisis yang mencukupi, data juga memberikan pandangan, makna dan mengandung banyak substansi.

Karena itu minimnya data juga mengindikasikan banyak hal. *Pertama*, kemungkinan fakta di lapangan yang tidak mengalami banyak dinamika, tetapi *stagnan*. Kondisi ini menjadikan data juga tidak dinamis. Dalam konteks ini, jika data yang ada mengenai pesantren itu minim, dapat diduga dinamika pesantren tidak tumbuh secara maksimal. *Kedua*, dalam konteks manajemen, data adalah pertanggungjawaban dari aktifitas (*action*). Pada aktifitas yang tinggi dan intens, secara otomatis akan memproduksi data yang banyak. Data yang banyak tersebut lalu dikelola dengan teknik administrasi. Jika aktifitas tinggi namun tidak ada data yang terkumpul, dapat diduga ada masalah dalam konteks pengelolaan data, yaitu lemahnya kegiatan administrasi.

Saat ini data yang dimiliki oleh Kantor Kemenag Kota Pekalongan mengenai pesantren menurut kantor kemenag sudah mencukupi. Kantor kemenag menggunakan borang isian dari sistem manajemen pendidikan Kementerian Agama RI, yang disebut EMIS (*Education Management Information System*).

Namun setelah ditelusuri, borang EMIS tersebut tidak dapat diisi dengan data yang mencukupi. Sebagai sampel, data mengenai jumlah pesantren, jumlah santri dan monografinya tidak dapat dipenuhi. Sebagai contoh, mengenai jumlah santri, data yang dimiliki oleh Kantor Kemenag dengan fakta di lapangan tidak seluruhnya valid. Data tersebut juga tidak di *up date* secara rutin dari waktu ke waktu. Akhirnya validitas data agak sulit dipastikan.

Selain jumlah santri, kantor kemenag juga tidak memiliki data mengenai kurikulum yang dikembangkan oleh tiap pesantren. Kantor Kemenag hanya memiliki kategorisasi pesantren, yakni tipe 1, 2 dan 3. Tetapi data kitab yang dikaji di setiap pesantren tidak dimiliki, demikian

juga perangkat kurikulum di pesantren. Kemenag juga tidak memiliki data spesifikasi pendidikan tiap pesantren. Data mengenai dinamika tiap pesantren juga sulit ditemukan. Program monitoring dan evaluasi rutin pesantren juga tidak ada.

Masalah yang melatarbelakangi minimnya data di Kantor Kemenag Kota Pekalongan ini menurut studi lapangan adalah (1) menurut Kantor Kemenag sebagian besar pesantren memang tidak memiliki sistem pengelolaan administrasi yang baik, termasuk data. Akibatnya setiap kali diminta mengisi borang, data yang dimasukkan selain minim biasanya juga kurang valid. (2), Kantor Kemenag sendiri tidak memiliki jadwal rutin untuk memperbaharui (*up date*) data. Pencarian data lebih sering dilakukan atas permintaan Kantor Kemenag pada jajaran di atasnya, Kanwil atau Kemenag RI (Jakarta). (3) Sampai dengan saat ini, Kantor Kemenag Kota Pekalongan belum memiliki desain system informasi pesantren, sehingga juga tidak memiliki data mengenai pesantren selain data yang diminta oleh kemenag pusat dalam system EMIS.

Pembinaan pesantren

Secara organisatoris, Kantor Kemenag Kota Pekalongan memiliki kewajiban dan kewenangan untuk membina pesantren. Pembinaan pesantren ini secara garis besar terdiri dari (1) pembinaan pendidikan, termasuk kurikulum; dan (2) pembinaan manajerial, yakni berhubungan dengan tata kelola pesantren.

Untuk kepentingan tersebut, Kemenag RI telah menyusun desain tata kerja antara Kantor Kemenag Kota/Kabupaten dengan pesantren. Wujudnya, di dalam organisasi Kantor Kemenag ada bagian yang khusus menangani masalah pesantren. Bagian ini ada mulai tingkat kota/kabupaten sampai dengan Kemenag Pusat.

Fakta di lapangan menunjukkan hal-hal yang cukup menarik sebagai berikut ; (1) Kantor Kemenag Kota Pekalongan tidak memiliki program yang bersifat khusus tentang pemberdayaan atau penguatan pesantren. (2) Kantor Kemenag juga tidak memiliki forum yang melembagakan banyaknya pesantren dalam suatu organisasi, apapun namanya. Setiap pesantren tumbuh sendiri-sendiri. Mereka mengatasi persoalan pentingnya tanpa kontribusi maksimal dari pihak lain. Antar pesantren juga tidak saling berkoordinasi, berkomunikasi, apalagi bermitra (kooperasi).

Akibatnya pesantren merasa bahwa kepentingan organisatoris dengan Kantor Kemenag bukan hal yang prinsipil dan fundamental. Pesantren hampir-hampir tidak memiliki jejaring (*organizational network*) institusional dengan birokrasi pemerintahan dalam arti yang sebenarnya.

Relasi Pemerintah Kota dengan kantor Kemenag

Secara organisatoris hubungan antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan bukanlah hubungan direktif, yang memiliki kekuatan atau kewenangan langsung untuk memerintah. Hubungan antara dua institusi tersebut bersifat koordinatif.

Idealnya, Pemerintah Kota Pekalongan membutuhkan masukan dari Kantor Kemenag Kota Pekalongan mengenai arti penting pesantren bagi pengembangan masyarakat Kota Pekalongan dan kondisi pesantren saat ini. Dalam konteks manajemen strategis (*social engineering*), pesantren memainkan peran strategis dalam mengubah masyarakat. Peran pesantren bukan saja dalam domain penguatan moral dan budaya, tetapi juga pada ranah lain. Pembangunan ekonomi kerakyatan, pengembangan sumber daya manusia, penguatan basis politik dalam arti pendidikan

politik, bukan pendidikan berpartai politik, dan ranah lain dapat dilakukan oleh pesantren atau menggunakan media pendidikan pesantren.

Sampai dengan tahun 2010 ini, relasi antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pesantren baru pada penggarapan dua hal. *Pertama*, penyelenggaraan wajar dikdas, berupa pendidikan kelompok belajar paket C. *Kedua*, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama antara pesantren dengan Badan Pemberdayaan masyarakat (Bapermas).

Program-program tersebut sebetulnya lebih tepat disebut pemanfaatan pesantren sebagai media atau kanal penyelenggaraan program-program pemerintah. Sementara program penguatan pesantren sendiri belum ada. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan tersebut sebetulnya juga sulit disebut sebagai keberhasilan pesantren, karena (1) pesantren sendiri tidak pernah merencanakan, (2) bukan domain pekerjaan pesantren dan (3) secara manajerial kegiatan atau *project-project* tersebut menjadi program yang direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh institusi lain, misalnya dinas perkoperasian, badan pemberdayaan masyarakat, dinas kesehatan dan lain-lain, bukan oleh pesantren. Dalam konteks yang agak pragmatis, sebetulnya program-program tersebut menjadikan pesantren sebagai obyek pekerjaan mereka, bukan sebagai subyek yang dilibatkan secara partisipatoris.

Kebijakan Strategis

Riset ini telah menemukan beberapa hal penting mengenai kondisi pesantren di Kota Pekalongan saat ini dan prediksinya ke depan berkaitan dengan dinamika sosial kemasyarakatan. *Pertama*, sejak pertama kali lahir hingga tahun ini, jumlah pesantren di Kota Pekalongan terus bertambah. Ini memberikan indikasi bahwa masyarakat (pengelola pesantren) memiliki keyakinan bahwa pesantren memiliki peran strategis bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat. Pengelola pesantren juga berkeyakinan masyarakat masih membutuhkan pendidikan pesantren dan peran lainnya. Namun juga harus dilihat secara kualitatif, bahwa pesantren di Kota Pekalongan tidak tumbuh sebagai pesantren yang besar, seperti halnya pesantren di kota-kota lain, Kediri, Jombang, Demak, Kendal, Wonosobo, Cirebon, dan sebagainya, yang memiliki jumlah santri banyak, institusi pendidikan cukup lengkap, dan memiliki pengaruh sosial keagamaan yang cukup kuat di masyarakat.

Pesantren di Kota Pekalongan kebanyakan jumlah santrinya sedikit, kitab-kitab yang dikaji termasuk kelompok dasar dan menengah dari standar tradisi pesantren, pengaruhnya bagi masyarakat tidak sampai melampaui batas regional, dan hampir belum pernah ada kegiatan keagamaan atau pesantren berskala nasional yang ditempatkan di Pesantren di Kota Pekalongan.

Pesantren-pesantren yang ada di Kota Pekalongan secara manajerial masih dikelola secara tradisional. Maksudnya, dari segi pengelolaan pendidikan, masih menggunakan cara-cara yang sederhana, belum mengimplementasikan konsep manajemen pendidikan modern *a la* pesantren.

Kedua, hampir bisa dikatakan, bahwa pesantren hidup secara mandiri, tidak bergantung pada institusi lain, termasuk kepada pemerintah (Kementerian Agama) yang dianggap memiliki otoritas dalam pemberdayaan pesantren. Ini sebuah ironi, karena satu sisi peran pesantren secara kelembagaan telah menunjukkan kontribusinya bagi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan tetapi secara politik pendidikan, pesantren mendapatkan perhatian yang amat sedikit dari pemerintah. Dalam beberapa hal, pesantren juga dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai media pemberdayaan masyarakat sekitar atau dalam hal pelaksanaan program-program pemerintah di luar program keagamaan. Ini menjadi fakta yang lebih memprihatinkan.

Namun di tengah dinamika kehidupan sosial saat ini pesantren tengah menghadapi tantangan yang cukup berat agar tetap bisa eksis dan berkontribusi lebih banyak lagi bagi masyarakat. Tantangan itu diantaranya adalah menurunnya animo masyarakat untuk belajar di pesantren di Kota Pekalongan. Mungkin animo masyarakat belajar di pesantren masih tetap, tetapi pesantren di Kota Pekalongan rupanya belum menjadi pilihan. Perlahan-lahan kondisinya terus melemah, bahkan beberapa pesantren kehabisan santri. Pondok Pesantren al-Islah, misalnya, yang konsepnya modern, berada di tengah Kota Pekalongan (Kelurahan Kraton), sudah 4 tahun ini tidak beroperasi karena kehabisan santri. Konsep pesantren ini bagus, diantaranya memfokuskan pada anak didik yang berkualitas, komitmen pada masyarakat tidak mampu dan pendidikan yang integratif. Di pesantren ini anak-anak tinggal dalam satu asrama. Pagi mereka bersekolah di SMP, selanjutnya tinggal di pesantren. Ustadz-ustadz pesantren juga jarang sekali (untuk tidak mengatakan tidak pernah) mendapat *up date* keilmuan yang diberikan oleh pemerintah. Ini berbeda dengan pengelola pendidikan formal yang terdapat banyak fasilitas, mulai biaya operasional, bantuan pembangunan sarana-prasarana hingga berbagai diklat, workshop dan seminar untuk pengembangan SDM.

Di sinilah perlu dukungan politik, kebijakan dan keberpihakan pemegang otoritas. Kementerian agama perlu lebih serius lagi mendampingi pesantren dan memberdayakannya. Jika memungkinkan, perlu ada kebijakan anggaran yang lebih mengokohkan bagi pesantren, seperti halnya lembaga pendidikan yang dikelola Kemenag. Kemenag perlu berinisiasi memunculkan *grand desain* kebijakan anggaran pesantren dalam belanja rutinnya.

Bentuk-bentuk kebijakan tentulah disesuaikan dengan kebutuhan, seperti dukungan sarana-prasarana. Untuk pemenuhan ini pemerintah dapat memberikan bantuan peningkatan sarana-prasarana mulai sarana pendidikan keras sampai lunak dengan dukungan anggaran yang mumpuni.

Pesantren perlu mendapat penguatan manajerial, misalnya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan implementasi manajemen organisasi dan pendidikan modern, kesempatan untuk mengekspresikan kreatifitas intelektualnya di forum-forum regional Kota Pekalongan, partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan dan sebagainya.

PENUTUP

Secara umum pondok pesantren di Kota Pekalongan tidak berkembang dengan maksimal. Hal ini diukur dari tiga parameter, yaitu; (a) penambahan jumlah santri, (b) perkembangan program pendidikan, (3) dan pertumbuhan kelembagaan pesantren. Ditinjau dari segi jumlah santri (*quantity*) hampir semua pondok pesantren di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir tidak mengalami penambahan santri yang signifikan. Sebagian besar pesantren jumlah santrinya stagnan, dan yang ekstrim ada 3 pesantren yang kehabisan santri sehingga mati, tidak beroperasi lagi atau berubah fungsi. Bentuk ubah-fungsi diantaranya adalah berubah menjadi taman pendidikan al-Qur'an dan majelis ta'lim.

Sebagai efek lanjut dari tidak bertambahnya jumlah santri, sebagian besar pesantren tidak dapat mengembangkan program-program pendidikannya. Akhirnya program pendidikan tidak mengalami pengembangan, tanpa kreasi dan inovasi. Kitab-kitab yang dikaji tidak berkembang pada kitab-kitab modern, aktual, atau kitab-kitab yang lebih besar.

Kelembagaan pesantren juga tidak berkembang secara baik. Maksudnya, pesantren sebagai institusi induk tidak dapat membangun institusi-institusi sayap sebagai produk pendukung atau

pengembangan pesantren. Sebagai contoh, pesantren di Kota Pekalongan tidak mampu mendirikan lembaga usaha produktif, misalnya di bidang sosial, ekonomi maupun intelektual. Pengembangan kelembagaan yang ada hanya taman pendidikan al-quran dan majelis ta'lim.

Faktor penyebab tidak berkembangnya pesantren di Kota Pekalongan cukup banyak. *Pertama*, tingkat kreatifitas pengelolaan pesantren relatif kurang berkembang. Hal ini dilihat dari pola manajemen yang dioperasikan oleh pengelola-pengelola pesantren yang relatif sama, yakni manajemen yang sederhana atau bahkan konvensional. Sebagai contoh, pesantren tidak mencoba menarik simpati masyarakat dengan menawarkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Pesantren juga lebih banyak bersikap pasif, kurang ada usaha yang signifikan dan strategis untuk mendapatkan santri baru. Ini berbeda dengan lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pesantren minim strategi marketing.

Kedua, secara komunal, tidak ada hubungan antar pesantren yang intens membicarakan masalah-masalah pengembangan pesantren. Tidak ada juga forum antar pengelola pesantren baik yang dibentuk oleh komunitas pesantren sendiri atau juga pemerintah. Kegiatan yang pernah dilakukan pesantren adalah *bahsul masalil*, diselenggarakan sebagai kegiatan untuk membicarakan masalah sosial, politik, kemasyarakatan dalam perspektif fiqh, tetapi forum ini bukan merupakan program pesantren. Ini adalah program institusi keagamaan. Di forum tersebut tidak ada pembicaraan tentang menginventarisasi dan mengembangkan pesantren. Contoh kegiatan antar pesantren lain, pertemuan antar-pengelola madin pesantren se-Kota Pekalongan digelar pada bulan Juni 2010, tetapi yang terasakan dalam pertemuan tersebut adalah nuansa politik menjelang pemilu Kota Pekalongan. Tema mengkritisi kondisi pesantren di Kota Pekalongan sendiri sampai saat ini belum pernah diangkat.

Ketiga, belum ada kemitraan yang memberi manfaat maksimal dalam pengembangan pesantren. Dalam konteks kemitraan dengan pemerintah Kota Pekalongan, pemerintah hanya memberi bantuan dana dan beras yang diberikan satu tahun sekali kepada pengelola pesantren yang mengajukan permohonan bantuan anggaran. Sedang yang tidak mengajukan tidak diberi bantuan anggaran. Besaran bantuannya pun relatif kecil, yakni antara 15-30 juta. Ironisnya pemberian ini tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur dalam ranah pendidikan. Akibatnya ada pesantren yang kebutuhan anggaran pendidikannya besar tetapi bantuannya sama dengan pesantren kecil, bahkan sama dengan pesantren yang beroperasinya tidak maksimal lagi.

Keempat, pemerintah Kota Pekalongan sampai saat ini belum memiliki program untuk pemberdayaan pesantren, sekalipun pemerintahan kali ini memiliki visi pengembangan Kota Pekalongan yang religius. Sampai saat ini DPRD Kota Pekalongan juga tidak memiliki produk legislasi atau regulasi yang menyangkut pesantren. Akibatnya, program pemberdayaan dan anggaran pengembangan pesantren tidak ada dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara kementerian Agama Kota Pekalongan juga tidak memiliki forum baku untuk membina pesantren. Program pemberdayaan pesantren sendiri relative kurang memungkinkan pesantren dapat benar-benar tumbuh. Dengan kondisi ini pesantren sepertinya hidup sendiri, tanpa dukungan *stakeholders* yang mencukupi.

Beberapa pemikiran yang dimungkinkan (*probably*) dapat diajukan sebagai solusi atas kondisi pesantren di Kota Pekalongan tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, secara manajerial, perlu ada penguatan sistem pengelolaan pondok pesantren yang ada di Kota Pekalongan. Penguatan manajerial ini diantaranya dalam bentuk pengenalan, pelatihan dan eksperimentasi manajemen baru pesantren. *Kedua*, secara institusional, pesantren perlu

memetakan orientasi pengembangan kelembagaan yang tepat. Argumennya, jika dalam bentuk kelembagaan sekarang ini kurang mendapat simpati dari masyarakat dan antusiasme untuk belajar di pesantren menurun, pesantren perlu mengembangkan diri dengan membentuk lembaga-lembaga pendukung pesantren dengan program yang lebih menarik dan kreatif, seperti pesantren menyelenggarakan kajian ilmu terapan, layanan kemasyarakatan, kemitraan dengan depdiknas dalam pembinaan keagamaan sekolah dan sebagainya. *Ketiga*, dalam konteks kebijakan, pemerintah Kota Pekalongan perlu merumuskan visi pembangunan masyarakat yang religius dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, agar visi tersebut memiliki kekuatan hukum dan politik pembangunan, sehingga akan mempermudah proses penganggaran (*budgeting*). Selain masalah anggaran, kebijakan tersebut juga perlu dirumuskan dalam bentuk program aksi pemberdayaan pesantren. Hal lain yang perlu dirumuskan dalam kebijakan strategis pemerintahan adalah pemerintah perlu melakukan kerjasama lintas lembaga, paling tidak antara pemerintah Kota Pekalongan, kementerian agama Kota Pekalongan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan, dalam hal realisasi visi pembangunan Kota Pekalongan sebagai kota religius.

Mengenai melemahnya ketertarikan masyarakat untuk studi di pesantren, perlu mendapat kajian lebih khusus. Fakta yang diperoleh dari riset ini, sebagian besar santri yang berada di pesantren di Kota Pekalongan berasal dari luar daerah. Sangat sedikit jumlah santri yang berasal dari dalam kota. Belum diketahui, apakah masyarakat Kota Pekalongan lebih berminat belajar di pesantren di kota lain atau memang antusiasme belajar di pesantren di kalangan masyarakat Kota Pekalongan telah menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, M. 2002. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Prasasti.
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Waktu Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Agama. 2003. *EMIS*. Jakarta: Departemen Agama.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2004. *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 1997. *Pengembangan Kurikulum*. Jakarta.
- Kafrawi. 1978. *Pembaharuan Sistem Pondok Pesantren sebagai usaha peningkatan prestasi kerja dan pembinaan kesatuan bangsa*. Jakarta: P.T, Cemara Indah
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Dhofier, Zamakhsari. 1984. *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan hidup kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Etzioni, Amitai. 1985. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: UI Press.
- Depag RI. 2004. *Panduan Praktis Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat Bidang Muamalah*. Jakarta: TP.
- Kohar, Asep, dkk. 2002. *Pesantren dan Unit Pengembangan Usaha Pondok Modern Gontor*. Jakarta: Depag-INCIS.
- KPU Kota Pekalongan. 2010. *Dokumen visi misi pasangan calon dalam pemilukada Kota Pekalongan 2010*. Pekalongan.
- UU No 32 tahun 2004
- Bappeda, RPJMD
- Depag RI. 2008. *Directory Pesantren*. Jakarta.
- APBD Kota Pekalongan 2010.
- Nawawi, Hadari. 1983. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada press.
- Singarimbun, Masri & Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Mungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi ekonomi dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan. 2009. *Pekalongan dalam Angka*, Pekalongan: tp.
- Chaq, Emirul, dkk. 2008. *Pekalongan Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Pekalongan Institute – Kirana Pustaka Indonesia.
- Kantor Bapermas Kota Pekalongan, 2010. *Statistik kemiskinan Kota Pekalongan*. Pekalongan, Oktober.
- Kantor Kemenag Kota Pekalongan, 2010. *Data EMIS*.